

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Dengan penelitian ini bisa disimpulkan jika pelaksanaan implementasi kebijakan sistem zonasi dalam usaha menyamakan pendidikan pada tingkat SMA di Kota Pangkalpinang sudah berjalan cukup baik. Hal ini berdasarkan secara perlahan hampir empat tahun kebijakan ini berjalan mulai menunjukkan ke arah positif, menjamin setiap anak bisa mendapatkan pendidikan, termasuk sekolah yang tidak jauh dari rumah dan untuk keluarga yang kurang mampu akan sangat terbantu dengan jalur afirmasi. Keberjalanan sistem ini terdapat pro dan kontra di dalam kalangan masyarakat. Kurangnya kuantitas sekolah negeri, dari SD hingga SMA jumlah sekolah negeri semakin sedikit dan pemahaman orang tua calon peserta didik menjadi hambatan tersendiri bagi pemerintah maupun satuan pendidikan di sekolah untuk mensukseskan sistem zonasi ini di pelaksanaan PPDB. Namun di sisi lain, sistem zonasi menghilangkan kesenjangan antara sekolah yang diminati atau terkenal dengan sekolah yang umum. Ini adalah tujuan pemerintah guna menyamakan pendidikan di Indonesia.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sejatinya sistem zonasi ini telah berdampak terhadap gap pendidikan di Kota Pangkalpinang seperti ketersediaan sarana dan prasarana yang merata, kesempatan yang sama bagi mereka yang memiliki latar belakang ekonomi dan sosial yang berbeda serta akses pendidikan yang merata. Sisi lainnya ketidakmerataan kuantitas guru yang menyebabkan *overwork* oleh beberapa guru di SMAN 1 Pangkalpinang, ketidaksiapan masyarakat dalam memahami sistematisa pendaftaran sekolah menggunakan sistem *online* dan

pemerintah dalam mengeksekusi kebijakan yang belum melihat secara utuh permasalahan akses website yang sering mengalami *server down* di lapangan tentu mewarnai hiruk pikuk kebijakan sistem zonasi. Oleh karena itu, pemerintah hanya fokus melakukan pemerataan di sektor penerimaan seleksi peserta didik baru, tanpa diikuti dengan kesiapan sumber daya manusia dan non manusia.

Studi ini memberikan cara pandang mengenai upaya menyelesaikan permasalahan kebijakan sebagai bentuk tugas dan tanggung jawab pemerintah daerah yaitu dinas pendidikan harus mampu secara efektif melihat kondisi aktual pendidikan dari berbagai sektor. Perlunya kesiapan dalam menyikapi gejolak sosial akan membentuk sikap lebih baik untuk keberlangsungan kebijakan yang setiap tahunnya terus mengalami evaluasi. Penggunaan Van Meter dan Van Horn dalam studi ini menekankan pada dua faktor utama yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan, yaitu faktor kebijakan itu sendiri dan faktor lingkungan implementasi. Dalam faktor kebijakan, temuan penelitian menunjukkan bahwa kebijakan sistem zonasi Sekolah Menengah Atas di Kota Pangkalpinang memiliki tujuan dan sasaran yang jelas, yaitu untuk menjamin akses dan pemerataan layanan pendidikan. Namun, terdapat kesenjangan dalam sumber daya kebijakan, terutama dalam hal kuota penerimaan siswa yang terbatas di beberapa sekolah favorit. Hal ini memperkuat argumen Van Meter dan Van Horn tentang pentingnya sumber daya yang memadai untuk mendukung implementasi kebijakan yang efektif.

Selanjutnya dalam faktor lingkungan, penelitian ini juga mengungkapkan bahwa lingkungan sosial, ekonomi, dan politik memiliki pengaruh signifikan terhadap implementasi kebijakan sistem zonasi di Sekolah Menengah Atas. Kondisi

sosial-ekonomi masyarakat yang beragam dan jarak tempat tinggal dari sekolah menjadi tantangan dalam penerapan kebijakan. Temuan ini memperkuat model Van Meter dan Van Horn yang menekankan pentingnya mempertimbangkan karakteristik lingkungan dalam proses implementasi kebijakan.

Dengan demikian, hasil penelitian ini memberikan kontribusi dalam memperkuat dan memperluas model implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn dengan menerapkannya pada konteks kebijakan sistem zonasi di Sekolah Menengah Atas. Temuan ini juga mengidentifikasi beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan dalam implementasi kebijakan di bidang pendidikan, seperti kuota penerimaan siswa, kondisi sosial-ekonomi masyarakat, dan jarak tempat tinggal dari sekolah.

4.2 Keterbatasan Penelitian

Peneliti menyadari bahwa penelitian yang dilakukan saat ini masih memiliki banyak kelemahan, kekurangan dan keterbatasan sebagai berikut:

Pertama, penelitian ini hanya difokuskan pada implementasi kebijakan sistem zonasi di Sekolah Menengah Atas di satu wilayah/kota saja, sehingga hasilnya mungkin tidak dapat digeneralisasi untuk seluruh wilayah di Indonesia. *Kedua*, waktu penelitian yang terbatas menyebabkan data yang dikumpulkan mungkin belum cukup komprehensif untuk menggambarkan seluruh aspek implementasi kebijakan sistem zonasi. *Ketiga*, akses terhadap beberapa data atau dokumen penting terkait kebijakan sistem zonasi terbatas, sehingga mungkin terdapat informasi yang terlewatkan dalam analisis. *Keempat*, informan dalam penelitian ini terbatas pada pihak-pihak yang terlibat langsung dalam implementasi kebijakan

sistem zonasi, sehingga perspektif dari pemangku kepentingan lain mungkin belum sepenuhnya terwakili. *Kelima*, meskipun upaya untuk menjaga objektivitas telah dilakukan, faktor subjektivitas peneliti dalam menginterpretasikan data dan informasi tidak dapat sepenuhnya dihilangkan.

4.3 Saran

Berangkat dari hal ini, sangat penting untuk pemerintah khususnya Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai garda terdepan dalam memastikan pelaksanaan kebijakan zonasi tingkat SMA Negeri di wilayah Kota Pangkalpinang, mengingat program ini tidak hanya dilaksanakan pada jenjang SMA, maka pembekalan juga harus telah diberikan saat calon peserta didik duduk dibangku Sekolah Menengah Pertama (SMP). Seperti memaksimalkan pembekalan kepada satuan pendidikan maupun masyarakat melewati sosialisasi yang masif dan berkala. Sistem ini juga tidak hanya membentuk pemerataan pendidikan kepada peserta didik, juga turut memberikan tenaga pengajar yang berkompetensi dan merata disetiap sekolah yang ada. Selanjutnya pemerintah juga mampu membangun sekolah lebih banyak untuk memperpendek jarak tempuh siswa dan mengurangi ketegangan antar calon pendaftar, menyediakan fasilitas transportasi sekolah, dan mampu menjalin kemitraan bersama organisasi masyarakat atau sektor swasta melalui program pendidikan yang mendorong partisipasi aktif masyarakat.

Peneliti memberikan rekomendasi kepada penelitian selanjutnya untuk memperluas cakupan penelitian, kemudian penggunaan metode penelitian campuran dapat lebih mengukur kondisi pelaksanaan kebijakan dengan pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Serta memperdalam analisis- analisis faktor kontekstual seperti kondisi sosial-ekonomi, kegiatan sekolah, dan informasi penelitian lainnya.